

	News Title : Investasi Aset Kripto, Masihkah Layak Dilirik?		
	Media Name : Koran Sindo	Journalist : FW Bahtiar, r ratna pumama, Sabir laluhu	
	Publish Date : 22 November 2022	Tonality : Positive	
	News Page : 1&2	News Value : 175,500,000	
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)), Budi Frensidy (Guru besar keuangan dan pasar modal Universitas Indonesia (UI)), Bhima Yudhistira (Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios)), Frans Sitepu (investor aset kripto)		Ads Value : 58,500,000
	Section/Rubrication : Berita Utama	Topic : kripto	

Investasi Aset Kripto, Masihkah Layak Dilirik?

JAKARTA – Perdagangan aset kripto di Tanah Air sedang mengalami penurunan. Euforia investasi aset berbasis digital itu pun kini meredup yang ditandai melemahnya jumlah transaksi.

Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah transaksi kripto pada 2020 mencapai Rp64,9 triliun dengan investor sebanyak 4 juta orang.

Setahun berselang, jumlah transaksi pada aset kripto melonjak menjadi Rp859,4 triliun

atau tumbuh 1.222%. Sepanjang tahun lalu, investor aset kripto juga bertambah hingga 7,2 juta orang dan pada Juni 2022 tercatat sebanyak 15,1 juta orang.

Angka tersebut melebihi jumlah investor di pasar modal yang sebanyak 9,1 juta orang. Namun, hingga September lalu nilai transaksi aset kripto baru Rp260 triliun. Pasar kripto dunia juga diguncang kebangkrutan mendadak dan cepat, seperti Tera Luna, Zipmex, dan terakhir, FTX.

Hal inilah yang kemudian membuat prediksi terhadap kondisi pasar kripto simpang siur.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

KEHAL2



((dari Hal 1

"Meningkatkan syarat bagi para pedagang yang bertujuan untuk mengamankan investor yang bertransaksi kripto di dalam negeri. Di sini Pemerintah Indonesia ingin memberikan jaminan, paling tidak risiko dalam investasi kripto di dalam negeri coba diminimalisasi dengan adanya ekosistem yang kuat. Di mana pedagang kripto dan aset kripto yang diperdagangkan juga diatur oleh ketentuan pemerintah," ujarnya kepada *KORAN SINDO*, kemarin.

Dia menjelaskan, bangkrutnya FTX karena kesalahan dalam investasi. Menurutnya, para pedagang yang sudah memiliki izin dari Bappebti selalu diawasi. Mereka juga harus melaporkan keuangannya secara periodik setiap bulan agar selalu terpantau ekuitas, dana, dan asetnya. Bappebti telah menghentikan perdagangan FTX di dalam negeri seiring dengan pengajuan paalit aset kripto tersebut ke pengadilan di Amerika Serikat.

Sepanjang tahun ini, ekonomi global dalam kondisi tidak pasti. Apalagi, saat ini sejumlah bank sentral negara-negara ma-

jumaenai kansuku bunga untuk mengendalikan inflasi dan prediksi resesi global pada tahun depan ditengarai memengaruhi minat investasi pada aset kripto. Tirta Karma menyatakan, efeknya tidak secara langsung karena pasar sudah lesu dari sebelumnya.

"Ditengah kondisi pasar lesu harus dimanfaatkan untuk evaluasi, seperti regulasi yang di *update/revisi*. Pedagang di dalam negeri ini sudah menerapkan sistem keamanan, penyimpanan aset, dana, dan transaksi sesuai peraturan yang berlaku sehingga pedagang akan meningkatkan jaminan layanan transaksi dan penyimpanan aset kripto ke depannya," paparnya.

Guru besar keuangan dan pasar modal Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menilai, ambruknya pasar kripto global berimbas pada pasar kripto di Tanah Air. Di ranah global, ada sejumlah kasus yang terjadi di antaranya kasus kaburnya *founder* uang kripto Dogecoin kemudian diburu oleh Interpol maupun bangkrutnya bursa kripto FTX.

Khusus untuk kaburnya *founder* Dogecoin, jika yang

bersangkutan berhasil dibekuk, maka tentu kerugian kliennya harus diganti. Dalam konteks Indonesia, tutur Budi, dulu untuk investasi kripto sebenarnya lebih banyak warga yang ikut-ikutan saat tren kripto mengamuk, tanpa mengerti latar belakang dan risikonya. Mereka dinilai hanya menginginkan keuntungan cepat tanpa memahami ihwal yang terjadi. Adapun yang ditengarai akibat diprovokasi atau diiming-imingi oleh orang-orang "yang sok pintar" atau yang membuat produk-produk investasi kripto.

"Kalau kita balik lagi, kenapa dulu itu tinggi di tingkat global, dimasa awal pandemi katakanlah di tahun 2020? Karena *kan* dulu itu Pemerintah Amerika Serikat menggaransi kredit kemudian bansos sehingga uang beredar relatif banyak, sementara ini ada yang relatif tidak adayangbarunya," tegas Budi.

Karena itu, kata dia, ahli-ahli keuangan yang kreatif lantas menciptakan produk untuk menampung *over liquidity*, di antaranya dengan menawarkan kripto, *financial technology (fintech)*, *startup*, dan sebagainya. Menurut Budi,

ada faktor lain selain ketidakpahaman warga terhadap kripto yang mengakibatkan terjadi krisis atau ambruknya pasar kripto global dan berdampak pada pasar nasional.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, masyarakat sempat tergiur pada aset kripto saat pandemi karena pertumbuhannya cukup cepat.

Saat pandemi mereda, ada pergeseran investasi dari kripto ke dolar Amerika Serikat dan pasar saham. Dia menuturkan, arah pergerakan pasar kripto sejalan dengan saham-saham teknologi.

"Jadi, kripto (seperti) Bitcoin dan Ethereum kalau dilihat hampir menyerupai pergerakan Nasdaq yang bursanya dominan oleh saham-saham teknologi. Jadi, *winteryang* terjadi di perusahaan teknologi itu berdampak juga terhadap minat ke kripto. Karena di tengah (ancaman) resesi ekonomi global, dan inflasi yang naik, aset-aset teknologi dipersepsikan berisiko tinggi," katanya.

Penurunan minat investasi kripto juga diduga dipengaruhi kasus-kasus kebangkrutan bur-

sa kripto global, seperti Tera Luna, Zipmex, dan FTX.

"Itu membuat khawatir investor sehingga mereka mengurangi *trust* atau kepercayaan untuk investasi di kripto dan menjual atau *withdraw*/penarikan uang. Itu sebenarnya faktor utama terjadi penurunan," paparnya.

Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebutkan kasus kebangkrutan yang terjadi itu terkait masalah *fraud*.

Menurut Bhima, kasus-kasus seperti ini tidak dipahami sebelumnya oleh para investor. Berdasar riset Celios, 75% investor ritel tidak memahami produk yang ingin dibeli. Mereka tidak mengetahui cara kerja bursa, tidak membaca *white paper*, bagaimana teknologinya, pengawasan, dan penggunaannya untuk apa. Jadi, adapangantar ketidakpahaman investor dengan persepsi risiko yang tinggi.

"Dari sisi investor begitu. Dari sisi bursa sendiri, pengawasannya banyak lubang hukum karena ini industri baru sehingga lubang-lubang tadi dieksploitasilah oleh oknum yang memanfaatkan *hype* kripto untuk keuntungan pribadi.

Itu yang menjadi *fraud*," ungkapnya.

Saat ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Satu di antara poin yang mendapat perhatian adalah pengawasan pasar aset kripto akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Bhima pun mengkritik rencana pengambilan kewenangan pengawasan dari Bappebti ini.

Ada beberapa alasan yang diutarakannya. *Pertama*, jika kewenangan pengawasan di BI dan OJK, maka aset kripto yang selama ini dipersepsikan sebagai komoditas akan berpeluang menjadi mata uang. "Ini nantinya akan rancu karena BI hanya mengawasi soal peredaran uang. Tapi, kalau aset kripto sebagai komoditas beda. Maksudnya, enggak bisa diperjualbelikan dengan aset lainnya," kata Bhima.

Kedua, kesiapan infrastrukturnya. Menurutnya, jika Bappebti nanti dipindahkan atau diambilalih oleh OJK, akan timbul masalah mengenaikesiapan

infrastruktur di internal BI dan OJK. Bhima mengkhawatirkan nanti para investor aset kripto lebih nyaman bertransaksi di negara lain.

Ketiga, saat RUU PPSK disahkan, maka akan ada masa transisi untuk peralihan. Kondisi ini dianggap sebagai masa yang tidak jelas dan risiko bisnis akan semakin tinggi. Ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menangguk keuntungan karena dianggap ada kekosongan aturan.

Sementara itu, Frans Sitepu, investor aset kripto, mengaku hingga kini masih tertarik dengan mata uang kripto. Menurut pria yang berprofesi sebagai bankir itu, saat ini memang aset kripto sedang cenderung melemah. Hal ini tidak terlepas dari situasi ekonomi global akibat resesi dan perang Rusia-Ukraina.

"Investor memilih untuk menaruh dananya di instrumen investasi yang relatif aman, berbanding terbalik dengan kripto yang cenderung *volatile*," ungkapnya.

✉ [f.w.bahtiar/sabtv.laluhu/rtratnapurnama](mailto:f.w.bahtiar@sabtv.laluhu/rtratnapurnama)